

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti memiliki kemampuan atau kekuatan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan derajat dan harga diri masyarakat yang kurang beruntung agar dapat mengatasi kondisi mereka. Pemberdayaan merupakan usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, membangkitkan, dan memotivasi mereka untuk menggali potensi yang dimiliki serta bekerja keras untuk mengembangkan potensi tersebut.

Menurut Suharto (2005:59-60). Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau kemampuan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada kondisi atau hasil yang ingin dicapai melalui perubahan sosial, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.

Adapun penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat menurut Suharto dapat dilakukan melalui yang dikenal dengan istilah dengan 5P yaitu:

Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan berikut ini adalah pendekatannya :

1. Pemungkinan adalah pemberdayaan masyarakat proses atau pendekatan yang memungkinkan individu atau kelompok masyarakat untuk memperoleh kemampuan, akses, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendekatan ini fokus pada membangun potensi dan kemandirian masyarakat melalui penguatan kapasitas lokal, pelatihan, serta akses terhadap informasi dan layanan. Dalam pemungkinan, masyarakat bukan hanya sebagai objek bantuan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam mengambil keputusan dan bertindak untuk kesejahteraan mereka. Hal ini sering dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta pihak swasta dalam menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian.

Pemungkinan juga melibatkan penghapusan hambatan-hambatan struktural yang menghalangi masyarakat untuk mencapai potensi maksimal mereka. Misalnya, peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta sumber daya ekonomi menjadi bagian dari upaya pemungkinan. Selain itu, pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga mereka memiliki kendali lebih besar atas nasib mereka sendiri. Dalam jangka panjang, tujuan dari pemungkinan adalah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan mampu mengatasi tantangan-tantangan yang ada dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Dengan pendekatan pemungkinan ini memiliki dua sub-pendekatan yaitu:

- 1) Suasana dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat merujuk pada kondisi atau lingkungan sosial yang tercipta selama proses pemberdayaan. Suasana yang dimaksud adalah keadaan yang mendukung, memotivasi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan kapasitas diri dan komunitas mereka. Suasana ini haruslah kondusif, inklusif, dan penuh dukungan agar masyarakat merasa nyaman untuk terlibat, menyampaikan aspirasi, dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam suasana yang mendukung, perasaan percaya diri, saling menghargai, dan rasa memiliki yang tinggi akan tumbuh, yang akhirnya memperkuat ikatan sosial dan kemauan untuk bersama-sama mewujudkan perubahan
- 2) Sekat-sekat kultural dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat mengacu pada nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat yang mempengaruhi proses pemberdayaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dan menghormati aspek-aspek budaya lokal dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan. Dengan memahami kultural, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada pemberian sumber daya fisik atau ekonomi, tetapi juga bagaimana nilai-nilai budaya dapat dijadikan landasan dalam memperkuat identitas, partisipasi, serta kemandirian masyarakat. Melibatkan elemen-elemen budaya dalam pemberdayaan akan mendorong penerimaan yang lebih besar dari masyarakat, sekaligus melestarikan warisan kultural mereka dalam proses pembangunan.

2. Penguatan dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah merujuk pada upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan sumber daya yang dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat agar mereka lebih mampu mengendalikan dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Proses penguatan ini dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, peningkatan akses terhadap informasi, serta penyediaan dukungan teknis dan finansial. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan mampu mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Dalam proses penguatan, masyarakat tidak hanya dibekali dengan pengetahuan atau keterampilan baru, tetapi juga diberi peluang untuk menggunakan dan mengembangkan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Penguatan juga melibatkan pengembangan kelembagaan masyarakat lokal, seperti kelompok-kelompok komunitas atau koperasi, agar mereka memiliki struktur yang solid dalam mengelola sumber daya dan kegiatan yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan sering kali juga melibatkan advokasi, di mana masyarakat diberdayakan untuk menyuarakan kepentingan mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, penguatan bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam interaksi dengan pihak luar, baik itu pemerintah, lembaga swadaya, atau sektor swasta, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga menjadi aktor utama dalam proses pembangunan. Dengan pendekatan penguatan ini memiliki dua sub-pendekatan yaitu:

- 1) Pengetahuan dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah merujuk pada pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat mengenai berbagai aspek kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, lingkungan, maupun politik. Dalam pemberdayaan, pengetahuan sangat penting karena dengan informasi yang memadai, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijak. Proses pemberdayaan sering kali melibatkan transfer pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun informal, seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan, atau berbagi informasi tentang hak-hak dan kewajiban. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat akan lebih sadar akan potensi mereka dan peluang yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidup.
- 2) Kemampuan adalah merujuk pada keterampilan praktis dan kapasitas yang dimiliki individu atau kelompok untuk bertindak dan mengimplementasikan apa yang mereka ketahui. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kemampuan dapat mencakup kemampuan teknis, manajerial, atau sosial, yang semuanya diperlukan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pengembangan kemampuan ini sering menjadi bagian penting dari program pemberdayaan, di mana masyarakat dilatih untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan mereka, seperti keterampilan usaha, pertanian, teknologi, atau pengelolaan sumber daya. Dengan meningkatkan kemampuan, masyarakat menjadi lebih

mandiri, lebih mampu memanfaatkan peluang yang ada, dan lebih siap menghadapi tantangan yang muncul di kehidupan mereka sehari-hari.

3. Perlindungan dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memastikan bahwa individu dan kelompok masyarakat memiliki jaminan atas hak-hak mereka, serta terlindungi dari berbagai risiko dan kerentanan, seperti kemiskinan, eksploitasi, ketidakadilan, dan bencana alam. Pendekatan ini melibatkan pembuatan kebijakan, sistem, dan mekanisme yang mencegah terjadinya ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam proses pemberdayaan, perlindungan tidak hanya bersifat pasif, seperti sekadar melindungi masyarakat dari bahaya, tetapi juga aktif dalam memberikan akses terhadap keadilan, layanan kesehatan, pendidikan, serta jaminan sosial yang memadai. Perlindungan ini memastikan bahwa masyarakat memiliki dukungan ketika menghadapi situasi yang sulit atau tidak menguntungkan, sehingga mereka dapat pulih dan melanjutkan pembangunan diri dan komunitas mereka.

Selain itu, perlindungan dalam pemberdayaan juga berarti melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sosial yang mempengaruhi mereka, sehingga tidak ada yang terpinggirkan atau dirugikan. Perlindungan ini berfokus pada membangun ketahanan masyarakat, sehingga mereka tidak hanya terlindungi dari ancaman, tetapi juga dapat bertahan dan berkembang meskipun dihadapkan pada tantangan. Misalnya, program asuransi

kesehatan atau jaminan pekerjaan, serta advokasi hak-hak sipil dan ekonomi, merupakan bentuk perlindungan yang diberikan untuk memastikan masyarakat memiliki kondisi yang stabil dan aman dalam menghadapi berbagai ketidakpastian.

- 1) Melindungi masyarakat lemah dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah memberikan perlindungan khusus kepada kelompok-kelompok yang rentan dan kurang berdaya, seperti masyarakat miskin, minoritas, perempuan, anak-anak, atau penyandang disabilitas, yang sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya dan kesempatan. Perlindungan ini dapat berupa kebijakan dan program yang dirancang untuk memastikan mereka tidak dieksploitasi, dirugikan, atau terpinggirkan. Melalui pemberdayaan, masyarakat lemah diberikan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang setara, serta dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan agar mereka bisa lebih mandiri dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Tujuan akhirnya adalah agar kelompok-kelompok ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi tantangan, baik secara sosial maupun ekonomi, serta memiliki peran yang setara dalam proses pembangunan.
- 2) Penghapusan diskriminasi dalam pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menghilangkan perlakuan tidak adil atau ketidaksetaraan berdasarkan ras, gender, agama, etnis, status sosial, atau faktor lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan di dalam masyarakat, di mana setiap individu atau kelompok memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Penghapusan diskriminasi sering kali melibatkan kebijakan afirmatif, advokasi hak asasi manusia, serta penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya inklusivitas dan kesetaraan. Dalam pemberdayaan masyarakat, penghapusan diskriminasi memungkinkan semua lapisan masyarakat, terutama yang sebelumnya terpinggirkan, untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

4. Penyokongan adalah merujuk pada upaya pemberian dukungan, baik berupa material, finansial, maupun non-material, yang diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk memperkuat posisi mereka dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Penyokongan ini bisa berupa bantuan modal usaha, akses terhadap teknologi, penyediaan infrastruktur dasar, hingga dukungan kebijakan dari pemerintah dan lembaga terkait. Tujuan utama penyokongan adalah memberikan dorongan awal atau penopang yang memungkinkan masyarakat, terutama yang kurang mampu, untuk memulai atau memperkuat usaha mereka dalam meningkatkan taraf hidup. Melalui penyokongan, masyarakat mendapatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengembangkan potensi yang ada dan memperluas peluang ekonomi serta sosial.

Selain dukungan material, penyokongan juga dapat berbentuk dukungan emosional dan sosial, di mana masyarakat diberikan motivasi, pendampingan, serta bimbingan dalam proses pemberdayaan. Pendekatan ini sering kali melibatkan fasilitator atau pendamping komunitas yang berperan sebagai mentor, memberikan arahan dan membantu masyarakat mengatasi tantangan yang dihadapi selama

proses pemberdayaan. Dengan penyokongan yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat memperkuat kepercayaan diri, membangun jaringan sosial yang solid, dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kemandirian. Penyokongan ini juga mempertegas bahwa masyarakat tidak dibiarkan berjuang sendiri, tetapi didampingi hingga mereka mampu berdiri sendiri dan mandiri dalam jangka panjang.

- 1) Bimbingan adalah proses pendampingan yang diberikan oleh pihak yang lebih berpengalaman atau berpengetahuan, seperti fasilitator, pendamping sosial, atau pemimpin komunitas, kepada masyarakat. Bimbingan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, serta memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam proses bimbingan, masyarakat diberikan arahan, saran, dan pengetahuan yang relevan agar mereka dapat lebih percaya diri dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan. Bimbingan juga bertindak sebagai panduan untuk mengembangkan keterampilan, baik itu keterampilan teknis, manajerial, maupun sosial, yang diperlukan agar masyarakat dapat mengelola sumber daya dan peluang dengan lebih baik.
- 2) Dukungan adalah mencakup segala bentuk bantuan yang diberikan untuk memperkuat posisi dan kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan mereka. Dukungan ini dapat bersifat material, seperti modal, peralatan, atau infrastruktur, maupun non-material, seperti dukungan moral, sosial, dan kebijakan. Dukungan juga mencakup akses ke layanan publik, seperti

pendidikan, kesehatan, dan pelatihan, yang membantu masyarakat mengatasi hambatan yang menghalangi mereka untuk berkembang. Melalui dukungan, masyarakat mendapatkan pijakan yang lebih kuat untuk memulai atau memperkuat usaha-usaha pemberdayaan mereka, serta membangun ketahanan dalam menghadapi tantangan. Dukungan yang berkelanjutan memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada bantuan sementara, tetapi juga tumbuh menjadi komunitas yang mandiri dan berdaya.

5. Pemeliharaan adalah upaya untuk menjaga keberlanjutan dan kelangsungan hasil-hasil pemberdayaan yang telah dicapai. Setelah masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau infrastruktur baru melalui program pemberdayaan, pemeliharaan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua ini tidak hanya bersifat sementara. Pemeliharaan melibatkan tindakan perawatan terhadap sumber daya yang telah diperoleh, seperti menjaga kualitas lingkungan, mempertahankan fasilitas umum, atau terus meningkatkan keterampilan yang telah dipelajari. Hal ini juga dapat mencakup pengelolaan dan pengawasan terhadap hasil program pemberdayaan agar tetap bermanfaat dalam jangka panjang, baik bagi individu maupun komunitas.

Selain itu, pemeliharaan juga mencakup perawatan terhadap aspek sosial dan kelembagaan yang terbangun selama proses pemberdayaan, seperti menjaga soliditas kelompok masyarakat, mempertahankan jaringan sosial, serta memperkuat kapasitas kelembagaan lokal. Dengan pemeliharaan yang baik, masyarakat dapat terus mengembangkan dan memanfaatkan hasil pemberdayaan secara

berkelanjutan, tanpa harus kembali ke keadaan sebelum pemberdayaan dilakukan. Pemeliharaan yang efektif juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dicapai. Dengan demikian, pemeliharaan bukan hanya tentang menjaga aset fisik, tetapi juga tentang memelihara semangat kemandirian dan daya tahan dalam menghadapi tantangan masa depan.

- 1) Kondisi yang kondusif adalah situasi atau lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dan efektif masyarakat dalam proses pemberdayaan. Kondisi ini mencakup suasana yang aman, nyaman, dan terbuka, di mana masyarakat bebas untuk berpendapat, berinovasi, dan berpartisipasi tanpa merasa takut atau terhambat oleh berbagai tekanan. Faktor-faktor seperti kebijakan yang mendukung, akses informasi yang transparan, serta dukungan dari pemerintah atau lembaga lokal berperan penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif. Lingkungan yang kondusif memungkinkan masyarakat untuk merasa diberdayakan, karena mereka memiliki ruang yang cukup untuk berkolaborasi, belajar, dan bertindak secara efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama.
- 2) Keselarasan adalah kondisi di mana berbagai elemen atau pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan—seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan individu—bekerja bersama secara harmonis dengan tujuan yang sama. Keselarasan mencakup keterpaduan antara nilai, kepentingan, dan tujuan program pemberdayaan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam praktiknya, keselarasan

memastikan bahwa strategi dan tindakan yang diambil selaras dengan budaya lokal, potensi masyarakat, serta sumber daya yang tersedia. Keselarasan ini penting untuk menciptakan sinergi di antara semua pihak, sehingga proses pemberdayaan dapat berjalan lancar dan hasilnya bermanfaat secara berkelanjutan. Dengan adanya keselarasan, pemberdayaan masyarakat dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan sesuai dengan harapan semua pihak yang terlibat.

Dalam pengertian lain, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk membangun kekuatan masyarakat dengan cara memotivasi, mendorong, serta membangkitkan kesadaran mereka akan potensi dan kemampuan yang dimiliki agar dapat mengembangkannya. Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai proses untuk memberikan kekuatan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan meminimalkan pihak yang terlalu berkuasa. Pemberdayaan merupakan langkah yang diambil untuk membangun masyarakat dengan fokus pada bidang intelektual, sosial-budaya, ekonomi-politik, serta keamanan dan lingkungan.

Pengertian pemberdayaan Menurut Sedarmayanti (2000:123) menjelaskan bahwa :

“Pemberdayaan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan manajemen” (Sedarmayanti. 2000:123).

Dari definisi pemberdayaan yang telah disebutkan diatas, dapat diambil beberapa poin penting, yaitu: Pemberdayaan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, sehingga mereka mampu mengisi lapangan

pekerjaan yang tersedia. Selain itu, pemberdayaan juga memungkinkan masyarakat untuk menciptakan dan memperluas peluang kerja baru. Proses-proses pemberdayaan menurut Sedarmayanti (2000:124) adalah sebagai berikut :

1. Membangun suasana yang mendukung pengembangan potensi manusia adalah hal yang utama. Pemberdayaan mencakup upaya memperkuat potensi tersebut dengan memberikan inspirasi, membangun, dan meningkatkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu, serta berusaha untuk mengembangkannya lebih lanjut.
2. Meningkatkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia melibatkan tindakan konkret yang meliputi pemberian masukan yang beragam dan memperluas akses terhadap peluang yang memberdayakan individu
3. Pemberdayaan harus menghindari penindasan terhadap yang lemah oleh yang lebih kuat, mengingat ketidakberdayaannya dalam menghadapi kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan peraturan-peraturan yang jelas dalam hukum yang melindungi mereka yang lemah.
(Sedarmayanti 2000:124)

Kemudian Menurut Sumaryadi (2005:11), pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Selain itu, dimensi-dimensi pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Membantu dalam pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari berbagai kelompok masyarakat yang lemah, rentan, miskin, perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat, dan kelompok wanita yang didiskriminasikan atau dikecualikan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial dan ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, serta aktif berperan dalam pembangunan masyarakat.
(Sumaryadi 2005:11)

2.1.1.1 Tujuan Pemberdayaan

Pada dasarnya, semua konsep pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian. Tujuan kesejahteraan tersebut

harus dicapai dengan membangun martabat kemanusiaan dan sesuai dengan prinsip pembangunan nasional. Hal ini karena setiap manusia atau masyarakat memiliki keinginan untuk membangun kehidupan mereka dan meningkatkan kesejahteraannya. Dengan berlandaskan pada kemampuan dan potensi yang dimilikinya, masyarakat yang sebelumnya dianggap lemah dan tidak berdaya dapat menjadi berdaya. Berdasarkan pandangan tersebut, konsep pemberdayaan harus berpusat pada manusia dan mengakar pada prinsip-prinsip kerakyatan. Program atau kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dan memberikan mereka kekuatan untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan.

Tujuan pemberdayaan menurut pendapat Suharto (2014:60) dalam buku *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* mengatakan :

“Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya”.(Suharto, 2014:60)

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan mengacu pada hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial, yaitu masyarakat yang memiliki kekuatan atau kemampuan pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ini dapat bersifat ekonomi, fisik, maupun sosial, seperti memiliki rasa percaya diri, kemampuan untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh mata pencaharian, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Pemberdayaan juga mencakup kemampuan untuk mandiri dalam melaksanakan

berbagai tugas kehidupan sehari-hari yang seharusnya dilakukan oleh setiap individu.

Menurut Chabib Soleh (2014:81), setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi pasti memiliki tujuan, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul "Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan," dia menjelaskan sebagai berikut:

“Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup. Perbaikan kualitas hidup tersebut bukan semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga fisik, mental, politik, keamanan, dan sosial budaya”. (Soleh, 2014:81)

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan bertujuan untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakat dari kondisi yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya dengan melakukan perbaikan pada berbagai aspek kualitas hidup mereka. Untuk mencapai tujuan yang bersifat umum dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa sasaran yang harus dicapai, antara lain:

1. Perbaikan kelembagaan : Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan melalui perbaikan kelembagaan, sehingga inovasi sosial yang dilakukan secara kemitraan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.
2. Perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik : Sasaran ini mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan.
3. Perbaikan lingkungan hidup : Memperbaiki kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi masyarakat, yang dapat mengancam kehidupan generasi yang akan datang.
4. Perbaikan akses : Meningkatkan akses terhadap inovasi teknologi, permodalan/kredit, sarana dan prasarana produksi, peralatan dan mesin, serta energi listrik yang diperlukan dalam produksi. Perbaikan akses pasar, jaminan harga, dan pengambilan keputusan politik juga penting.

5. Perbaikan Tindakan : Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, sehingga dapat berdampak pada perbaikan sikap dan tindakan yang lebih bermartabat.
6. usaha produktif : Melalui pendidikan, pelatihan, perbaikan kelembagaan, dan akses perkreditan, diharapkan usaha produktif akan lebih maju dan berdaya saing.
7. Perbaikan bidang lainnya : Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam lingkungan masyarakat tertentu.
(Soleh, 2014)

Pendapat tentang tujuan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Soleh (2014) menekankan bahwa proses pemberdayaan bertujuan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup mereka. Tujuan tersebut dicapai melalui beberapa perbaikan yang mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, fisik, mental, politik, keamanan, dan sosial budaya. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan berbagai dimensi kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.2 Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk suatu sistem yang bersifat semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi terjadi di antara individu-individu dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarak. Berdasarkan pengertian ini, masyarakat adalah jaringan hubungan antar entitas. Masyarakat merupakan komunitas yang saling bergantung satu sama lain. Kata "masyarakat" berakar dari bahasa Arab "syaraka," yang berarti berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris, istilah society digunakan, yang

berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti teman atau kawan. Berikut definisi masyarakat menurut Soeharto, yaitu :

“Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, dan kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama”. (Suharto, 2010:47)

Berdasarkan definisi tersebut, adanya kesamaan yang dimiliki akan membentuk suatu kelompok dengan prinsip-prinsip yang sejalan. Kesamaan tersebut akan menciptakan kekuatan yang terbangun melalui saling dukung antar anggota. Hal ini sejalan dengan pandangan Selo Sumardjan dalam bukunya berjudul *Setangkai Bunga Sosiologi*, yaitu: “masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan”.(Sumardjan, 1964:115).

Kesamaan yang dimiliki oleh setiap individu dalam suatu kelompok dapat menghasilkan sebuah kebudayaan yang menjadi ciri khas atau identitas masyarakat tersebut. Kebudayaan mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, seni, adat istiadat, hukum, serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Koentjaraningrat definisi

“Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat continue dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama”. (Koentjaraningrat, 1994:339)

Berdasarkan pendapat tersebut, kesamaan identitas inilah yang menjadikan sekelompok individu atau masyarakat sebagai sebuah kekuatan yang didedikasikan untuk kepentingan bersama dengan masyarakat lain. Sistem adat dan tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan dengan saling keterikatan untuk menjaga kebudayaan yang sudah ada tetap lestari. Masyarakat menurut Alimandan dalam buku *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, menjelaskan:

“Pengertian masyarakat dengan istilah Community, dimana istilah tersebut menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok itu disebut masyarakat” (Alimandan, 1985:3).

Menurut pendapat tersebut, masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan dan keinginan mereka. Menurut Soerjono Soekanto alam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini :

1. Beranggotakan minimal dua orang.
 2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
 3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.
 4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.
- (Soekanto, 2006:71)

Berdasarkan penjelasan di atas, kesatuan dan kesamaan dalam masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberlangsungan suatu kelompok, yang kemudian melahirkan kebudayaan sebagai identitas yang kuat. Hubungan yang terjalin dalam waktu lama memungkinkan terbentuknya komunikasi yang harmonis karena adanya kebiasaan bersama, sehingga menghasilkan aturan-aturan yang disepakati oleh anggota masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Adapun beberapa fungsi masyarakat menurut Suharto adalah:

1. Penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa
 2. Lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan
 3. Keamanan publik
 4. Sosialisai
 5. Wadah dukungan bersama atau gotong royong
 6. Kontrol sosial
 7. Organisasi dan partisipasi politik
- (Suharto, 2010:47)

Definisi fungsi masyarakat ini muncul dari adanya kesamaan yang membentuk peran masyarakat dalam saling mendukung satu sama lain. Masyarakat berfungsi sebagai sarana untuk memberikan dukungan kolektif demi mencapai tujuan bersama. Tujuan utama pemberdayaan adalah menciptakan keadilan sosial dengan memberikan kesejahteraan yang lebih besar serta kesetaraan politik dan sosial melalui kerjasama dan pembelajaran. Proses ini dilakukan melalui langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Meski begitu, pemberdayaan memerlukan proses yang panjang agar masyarakat dapat menjadi lebih mandiri dan kuat.

Berdasarkan uraian pengertian mengenai pemberdayaan dan masyarakat, mana menurut Suntoyo Usman mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

“Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian” (Sunyoto, 2008:30).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam proses ini masyarakat didampingi untuk menganalisis masalah yang dihadapi dan dibantu dalam menemukan alternatif solusi. Mereka juga diperlihatkan cara memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki dan dikuasai. Dalam proses ini, masyarakat dibimbing untuk merancang kegiatan sesuai dengan kemampuan mereka, mengimplementasikan rencana tersebut, serta membangun strategi untuk memperoleh sumber daya eksternal yang diperlukan guna mencapai hasil yang optimal.

Sedangkan mengenai unsur-unsur pemberdayaan masyarakat, menurut Suhendra unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Kemauan politik yang mendukung
 2. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh
 3. Motivasi
 4. Potensi masyarakat
 5. Peluang yang tersedia
 6. Kerelaan mengalihkan wewenang
 7. Perlindungan
 8. Awareness (kesadaran)
- (Suhendra, 2006: 87)

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah bentuk rencana kegiatan yang realistis, ditandai dengan adanya sasaran, kebijakan, dan prosedur pelaksanaan yang jelas. Berdasarkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat yang baik tersebut, perumusan program pemberdayaan sebaiknya memperhatikan hal-hal tersebut agar program yang dilaksanakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep untuk membantu masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara mandiri. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan mampu mengambil keputusan serta mengelola sumber daya yang dimilikinya. Prosesnya meliputi meningkatkan kesadaran dan kepercayaan diri, mengembangkan keterampilan dan kemampuan, membangun akses terhadap sumber daya, menguatkan kelembagaan masyarakat, serta mengembangkan jaringan dan kemitraan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka sendiri secara berkelanjutan.

Bahkan World Bank dalam Bulletinnya Vol. 11 No.4/Vol. 2 No. 1 October-Desember 2001 telah menetapkan pemberdayaan sebagai salah satu ujung-tombak dari Strategi Trisula (three pronged strategy) untuk memerangi kemiskinan yang dilaksanakan sejak memasuki dasawarsa 90-an, yang terdiri dari penggalakan peluang (promoting opportunity) fasilitasi pemberdayaan (facilitating empowerment) dan peningkatan keamanan (enhancing security) (Dr. Sri Handini, MM, *et.all*, 2019). Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Menurut (Sumodiningrat,1997:165) mengenai pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa :

“Memberdayakan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat”.
(Sumodiningrat,1997:165)

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan konsep yang multidimensional, yang berarti tidak hanya dapat diakses secara eksternal melalui bantuan modal, fasilitas, dan dukungan dalam kebijakan, tetapi juga melalui faktor internal individu itu sendiri. Hal ini mencakup paradigma berpikir seseorang dan pendekatan diri

setiap individu terhadap situasi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah positif selain menciptakan iklim dan suasana yang mendukung.

Pada hakikatnya, konsep pemberdayaan merupakan suatu proses yang berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat, bukan sekadar sebagai objek sasaran kekuasaan semata. Upaya yang dilakukan dalam mendistribusikan pemberdayaan kepada manusia harus dilakukan secara kolektif, meliputi pemberdayaan diri individu (*individual self-empowerment*) dan pemberdayaan secara bersama-sama (*collective self-empowerment*).

Pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat sehingga mereka dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Menurut Sumardjo (2003), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana kesempatan, motivasi, dan kemampuan masyarakat dikembangkan sehingga mereka dapat mengakses sumber daya dan meningkatkan kapasitas mereka untuk mengambil peran aktif dalam menentukan arah masa depan mereka sendiri. Hal ini dilakukan dengan berpartisipasi dalam pengaruh dan realisasi kualitas kehidupan individu dan komunitasnya.

Kemandirian masyarakat adalah keadaan di mana mereka memiliki kemampuan untuk merencanakan, memutuskan, dan melaksanakan tindakan yang dianggap bermanfaat untuk mengatasi masalah dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki sendiri. Melalui pemandirian, kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku untuk mencapai kemajuan. Pemberdayaan tidak hanya ditujukan kepada

masyarakat yang lemah, tetapi juga kepada mereka yang memiliki potensi namun masih terbatas dalam mencapai kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan pengeksploasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat. (Endah, K. 2020).

Berdasarkan beberapa teori dan definisi tentang konsep pemberdayaan yang telah dijelaskan di atas, peneliti dapat mengaitkan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPUKMPP) dalam mensejahterakan pelaku usaha di kecamatan jatigede kabupaten sumedang. Pemberdayaan UMKM adalah suatu upaya untuk memperkuat dan memberikan kekuatan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah melalui kegiatan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dalam menjalankan aktivitas kehidupan mereka.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bab I (Pasal 1, Nomor 8) mendefinisikan hal tersebut sebagai berikut:

“Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim, dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemberdayaan UMKM merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan UMKM agar tetap kuat dan mandiri. Konsep penumbuhan iklim usaha yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2008 merujuk pada kondisi yang diupayakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara bersinergi. Hal ini dilakukan melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, sehingga UMKM dapat memperoleh perlindungan, dukungan, pemihakan, kepastian, dan kesempatan berusaha yang maksimal (Pasal 1, Nomor 9).

Pendapat di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan proses pemberdayaan dan tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan-pendekatan melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. Pendekatan tersebut meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan yang di terapkan pelaku pemberdayaan terhadap masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan pemberdayaan yaitu menjadikan masyarakat yang lemah dan kurang berdaya menjadi masyarakat yang berdaya dan mampu bersaing.

Aspek kunci dalam pemberdayaan masyarakat adalah pondasi yang mendasari upaya untuk memberikan individu, kelompok, atau komunitas kontrol atas kehidupan mereka, meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, mengembangkan kapasitas, dan mengurangi ketidaksetaraan (Hasdiansyah, 2023). Pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi tentang menciptakan lingkungan dimana individu atau kelompok dapat mengambil alih kendali atas masa depan dan berkontribusi pada perubahan yang positif dalam masyarakat secara keseluruhan. Aspek kunci dalam pemberdayaan masyarakat yakni sebagai berikut:

1. Kontrol : salah satu pilar utama pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencakup pada memberikan individu, kelompok atau komunitas hak dan kemampuan untuk mengendalikan aspek kehidupan.
2. Partisipasi : partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan adalah komponen penting dari pemberdayaan masyarakat. Partisipasi yang kuat menciptakan lingkungan yang lebih demokratis dan menghargai berbagai pandangan dan pengalaman.
3. Pengembangan kapasitas : upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya manusia. Pengembangan kapasitas ini mencakup pada pelatihan keterampilan, pendidikan, dan bimbingan yang relevan dengan tujuan pemberdayaan.
4. Pengurangan ketidaksetaraan : aspek ini mencakup memberikan kesempatan yang lebih merata kepada individu dan kelompok yang mungkin rentan atau terpinggirkan dalam masyarakat. Aspek ini merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kemandirian bidang sosial dan ekonomi dan untuk mencapai kesuksesan program tersebut, memiliki banyak corak dalam pemberdayaan masyarakatnya (Afriansyah, 2023). Karakteristik yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat harus dapat membangun masyarakat, dimana sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Model dan strategi pemberdayaan masyarakat, ditempuh

melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya. Benih pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakatnya akhirnya akan beradaptasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan, serta cara/pendekatan mereka. Berikut ini terdapat beberapa corak dari pemberdayaan masyarakat, antara lain terdiri atas:

1. *Community leader*, Sebagai contoh komunitas leader yaitu petugas kesehatan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin terlebih dahulu seperti camat, lurah, kepala adat, ustad, dan sebagainya.
2. *Community organization*, merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat, komunitas organisasi dapat berupa PKK, karang taruna, majlis taklim dan lainnnya.
3. *Community Fund*, dapat berupa dana sehat atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat.
4. *Community material*, setiap daerah memiliki potensi tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Misalnya, desa dekat kali pengahsil pasir memiliki potensi untuk melakukan pengerasan jalan untuk memudahkan akses ke puskesmas.

5. *Community knowledge*, disini pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan *community based health education*.
6. *Community technology*, pada komunitas teknologi sederhana di komunitas dapat digunakan untuk pengembangan program kesehatan misalnya penyaringan air dengan pasir atau arang.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (people centered development) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya. Keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan- pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan (Effendi and Sugandini, 2013).

Tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikutip dari buku pemberdayaan masyarakat oleh Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (Patilaiya, Hairudin La, *et.all* 2022) sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Ada dua hal yang perlu dikerjakan dalam tahapan ini, yakni penyiapan petugas tenaga pemberdayaan oleh Community Worker dan penyiapan lapangan. Persiapan ini dilakukan agar pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dengan lancar.

b. Tahap Pengkajian

Tahap pengkajian atau assessment dapat dilakukan secara individual lewat kelompok-kelompok masyarakat. Pada tahap ini, petugas mengidentifikasi masalah keputusan dan sumber daya yang dimiliki klien. Ini dilakukan untuk menentukan sasaran pemberdayaan yang tepat

c. Tahap Perencanaan Program

Masyarakat diharapkan bisa memikirkan beberapa alternative program berikut kelebihan dan kekurangannya. Nantinya, alternative tersebut dipakai untuk menentukan program yang paling efektif.

d. Tahap Performalisasi

Pada tahap performalisasi, agen perubahan membentuk kelompok untuk menentukan program yang bisa mengatasi permasalahan. Petugas juga memformalisasi gagasan tersebut ke dalam tulisan, apabila ada kaitannya dengan pembuatan proposal pada penyandang dana.

e. Tahap Implementasi

Dalam tahap implementasi, masyarakat harus memahami maksud, tujuan dan sasaran program untuk menghindari kendala dalam implementasi program. Mereka juga harus bekerja sama dengan petugas.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan. Program ini sebaiknya melibatkan warga untuk membangun komunitas pengawasan internal dan komunikasi masyarakat yang lebih mandiri.

g. Tahap Terminasi

Proyek harus berhenti, sebab, masyarakat yang diberdayakan sudah mampu mengubah kondisi yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik.

Pengertian pemberdayaan masyarakat juga dikemukakan oleh Soetomo dalam bukunya yang berjudul sebagai berikut:

”Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya”. (Soetomo, 2011:69).

Berdasarkan pengertian tersebut, masyarakat memiliki wewenang yang lebih luas, mencakup seluruh proses pembangunan mulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan. Selain memiliki akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan, masyarakat lokal juga memiliki akses dan kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya.

2.1.4 Pemerintah

Pemerintah, secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani, yaitu "kubernan" yang berarti nahkoda kapal. Analogi ini menggambarkan pemerintah sebagai nahkoda yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Tugas pemerintah mencakup penyusunan kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam bingkai bernegara. Aktivitas pemerintah terutama terfokus pada pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, atau keinginan politik, guna mencapai tujuan negara. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi negara, pemerintah menjadi salah satu elemen penting dalam pembentukan negara. Pemerintah memiliki wewenang untuk bertindak atas nama negara dan menjalankan kekuasaan negara. Hal ini bertujuan agar tujuan dan sasaran negara dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Pemerintah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki beberapa definisi. Pertama, sebagai sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Kedua, sebagai sekelompok orang yang bersama-sama bertanggung jawab dalam menggunakan kekuasaan. Ketiga, sebagai penguasa yang memerintah. Namun, ada juga yang mendefinisikan pemerintah sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam suatu negara, negara bagian/provinsi, atau kota, dan sebagainya.

Ndraha mengartikan pemerintah sebagai segala perangkat negara atau lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. (Ndraha, Taliziduhu. 2005).

Pemerintah sebagai entitas yang terdiri dari segala perangkat atau lembaga negara yang memiliki fungsi utama sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Interpretasi ini menyoroti bahwa pemerintah tidak hanya terbatas pada satu entitas tunggal, tetapi mencakup berbagai lembaga dan perangkat yang bekerja bersama-sama untuk mengimplementasikan kebijakan dan program untuk kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Menurut Inu Kencana (2007) Pemerintah adalah organisasi negara yang mengambil alih kekuasaan untuk menentukan tujuan yang mencakup keamanan eksternal, keadilan, ketertiban internal, kepentingan publik, dan kebebasan. Sedangkan menurut Suradinata, pemerintah diartikan sebagai organisasi yang memiliki kekuatan besar dalam suatu negara, termasuk dalam urusan teritorial, publik, serta urusan kekuasaan lainnya, demi mencapai tujuan negara.

Dari penjabaran di atas, pemerintah dapat diartikan sebagai organisasi yang bertugas untuk mengatur dan memimpin negara, menegakkan hukum, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya pemerintah, negara tidak akan dapat berfungsi dengan baik karena pemerintah merupakan salah satu unsur penting dari berdirinya suatu negara. Sebagai entitas yang memiliki kekuasaan dan wewenang, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut demi kepentingan bersama dan kemajuan negara serta masyarakatnya.

2.1.5 UMKM

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah selain itu definisi UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Pandji Anorangga menjelaskan UMKM adalah usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. (Pandji Anorangga,1997)

Pendapat diatas menjelaskan bahwa UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sesuai dengan peraturan dan UMKM memiliki peran yang tinggi untuk perekonomian indonesia yang masih belum stabil karena masih termasuk negara berkembang.

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 1 tentang UMKM mendefinisikan pengertian UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
(Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Pasal 1)

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 1 pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha mikro kecil dan menengah milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sesuai dengan peraturan dan bukan termasuk perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berhubungan langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Selanjutnya menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 6 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1. Kriteria Usah Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000. (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000. (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000. (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000. (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000. (Lima Puluh Milyar Rupiah)
(Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Pasal 6)

Berdasarkan pengertian diatas usaha mikro, kecil dan menengah memiliki tiga kriteria yang berbeda beda yang pertama kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tiga ratus juta

,sedangkan kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Lima puluh juta sampai dengan paling banyak lima ratus juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha selain itu kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Lima ratus juta sampai dengan paling banyak sepuluh milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam upaya mensejahterakan pelaku usaha di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, perlu dilakukan analisis menyeluruh terkait potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Analisis ini mencakup identifikasi permasalahan yang terjadi seperti Rendahnya Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI): Pelaku usaha menghadapi tantangan dalam memanfaatkan TI karena keterbatasan infrastruktur, kurangnya pengetahuan dan keterampilan terkait TI, biaya implementasi yang tinggi, serta minimnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait. Keterbatasan Database UMKM: Ketidaktersediaan database UMKM yang akurat menghambat pemahaman profil dan kebutuhan UMKM, serta menyulitkan perencanaan program bantuan, monitoring, dan evaluasi kebijakan yang efektif.

Pemberdayaan Masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari tingkat keberhasilan yang disingkat menjadi 5P yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

Beranjak permasalahan diatas teori Suharto dianggap cocok untuk menganalisis permasalahan tersebut menggunakan lima indikator pendekatan

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edi Suhato (1977) yaitu :

1. Pemungkinan Adalah suasana atau iklim pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang secara optimal.
 - a. Upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Ini melibatkan penyediaan fasilitas, pelatihan, dan dukungan yang mendorong kreativitas, inovasi, serta kapasitas individu dan kelompok untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih baik.
 - b. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Ini berarti mengatasi hambatan budaya dan struktural yang menghalangi partisipasi aktif dan produktif dari masyarakat, sehingga mereka dapat lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka, inklusif, dan berdaya guna dalam membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan.
2. Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang dalam menghadapi persaingan. Penguatan tersebut meliputi :
 - a. Memperkuat pengetahuan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan yang bertujuan meningkatkan

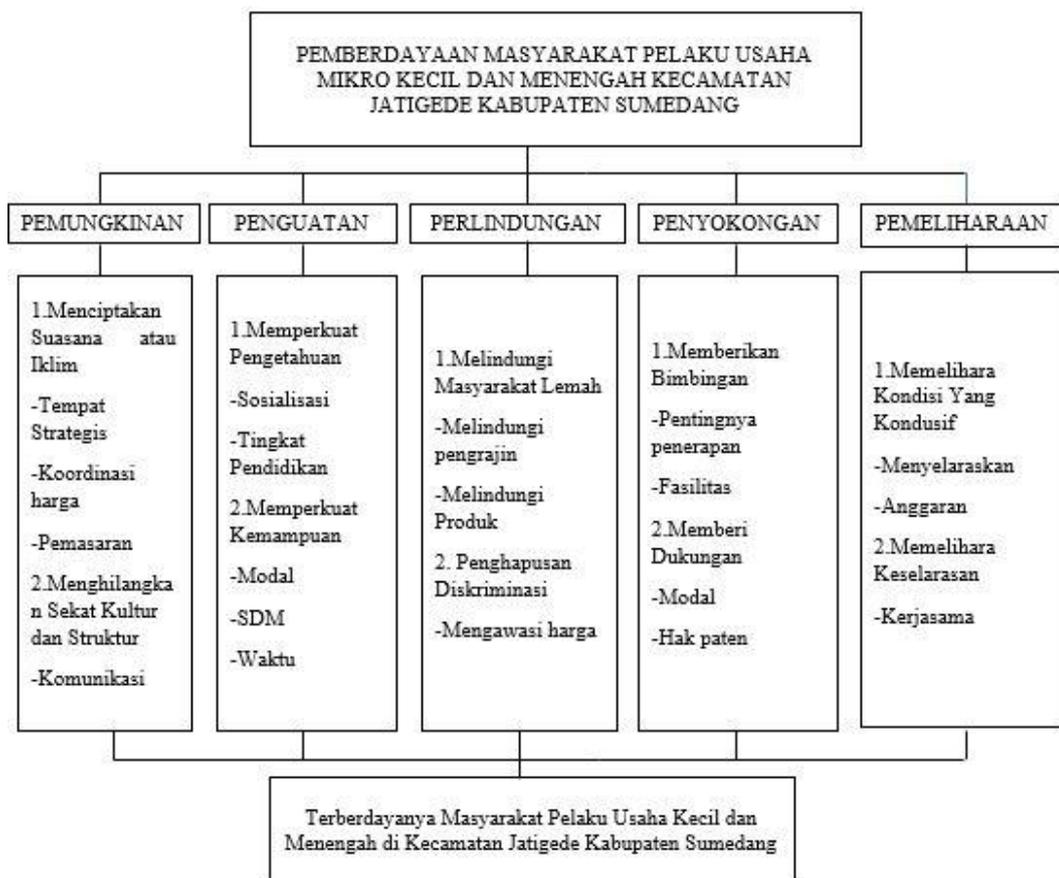
- wawasan dan keterampilan para pelaku UKM, termasuk pengetahuan tentang manajemen bisnis, pemasaran, dan penggunaan teknologi.
- b. Memperkuat kemampuan. Ini melibatkan penyediaan akses ke sumber daya yang diperlukan, seperti modal dan jaringan bisnis, serta bimbingan untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa mereka di pasar.
3. Perlindungan adalah melindungi Masyarakat lemah pelaku usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang agar mampu menghadapi persaingan.
 - a. Melindungi masyarakat lemah. Ini mencakup penyediaan dukungan khusus bagi kelompok-kelompok rentan agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan ekonomi. Langkah-langkah yang diambil termasuk pemberian bantuan modal, pendampingan, serta akses ke layanan dasar yang mendukung kelangsungan usaha mereka.
 - b. Penghapusan diskriminasi. Pemberdayaan ini berupaya memastikan bahwa semua pelaku UKM, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau gender, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini dilakukan dengan menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil, serta menegakkan aturan yang melindungi hak-hak mereka dari praktik-praktik diskriminatif.
 4. Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Sumedang agar para pelaku usaha kecil dan menengah mampu menghadapi persaingan.

- a. Memberikan bimbingan. Ini melibatkan penyediaan pelatihan dan konsultasi yang berkesinambungan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UKM dalam berbagai aspek bisnis, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan inovasi produk.
 - b. Memberi dukungan. Ini berarti menyediakan akses ke sumber daya yang diperlukan, seperti bantuan permodalan, fasilitas produksi, dan jaringan pemasaran, serta pendampingan dalam menghadapi tantangan operasional. Dengan memberikan bimbingan dan dukungan yang komprehensif, pemberdayaan ini diharapkan dapat membantu pelaku UKM di Jatigede mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
5. Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam ruang lingkup pelaku usaha kecil dan menengah sehingga mampu bersaing.
- a. Memperkuat pengetahuan, dengan menyediakan program pelatihan dan edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang manajemen bisnis, teknologi, dan pasar.
 - b. Memperkuat kemampuan, dengan menyediakan dukungan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan, seperti akses ke modal usaha, fasilitas produksi, serta jaringan distribusi. Dengan memelihara kedua aspek ini, diharapkan pelaku UKM di Jatigede dapat bertahan dan

berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi positif terhadap ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakatnya.

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



(Sumber : Pemikiran Peneliti 2024)

2.3 Proposisi

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka proposisi pada penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang (Studi Deskriptif Pelaku Usaha Kecil) akan berhasil ditentukan oleh lima pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu, Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.